

TESIS

**PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH AHLI WARIS PENGGANTI
DENGAN MENYIMPANGI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
(Analisis Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo)**



OLEH:

**MOHAMAD MIRZALINO SAFRYAN DILAPANGA
NIM.031924253008**

**PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH AHLI WARIS PENGGANTI
DENGAN MENYIMPANGI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
(Analisis Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo)**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

**OLEH:
MOHAMAD MIRZALINO SAFRYAN DILAPANGA
031924253008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Hari/Tanggal (Senin, 10 Januari 2022)

Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.

NIP. 196705201992031002

Dosen Pembimbing Kedua:

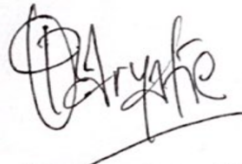


Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

NIP. 198511162014041001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada Hari/Tanggal (Senin, 10 Januari 2022)**

PANITIA PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H
Nip. 198003202005012002**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Nip. 196705201992031002
2. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
Nip. 198511162014041001
3. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M
Nip.
4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
Nip. 198909242015041001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga

NIM : 031924253008

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 January 2022



; membuat pernyataan,

Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, S.H.

NIM. 031924253008

MOTTO

*“Karyamu akan menempati bagian tersendiri
dalam hidupmu”*

ABSTRAK

Ahli Waris Pengganti Dalam Menyimpangi Penetapan Pengadilan Agama menandakan pada beragamnya permasalahan waris Islam yang ada di Indonesia, terlebih adanya keterlibatan ahli waris pengganti sebagai salah satu ahli waris memunculkan problematika baru di lingkungan masyarakat atas beragamnya pendapat para ahli hukum akan kedudukan dari ahli waris pengganti, Pengadilan sebagai Lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam menetapkan permasalahan waris sering kali diikuti dengan penyimpangan dari para ahli waris sebagai Pemohon atau para pihak dari penetapan Pengadilan untuk dapat melakukan pembagian diluar dari putusan majelis hakim yang ada dengan alih-alih kesepakatan dari para ahli waris dengan dibuatkannya perjanjian damai dengan wujud “Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris” melalui Notaris.

Bersama dengan Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Hak Mewaris yang sama-sama menjelaskan mengenai hak dari tiap-tiap ahli waris dalam memperoleh harta waris yang dapat diterbitkan oleh Notaris sering kali tidak mengetahui bahwa Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris memiliki perbedaan karakter dengan Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Hak Mewaris. Sehingga keinginan dari para ahli waris sebagai pemohon di dalam Penetapan Pengadilan atas sebuah perkara waris tidak dapat di wujudkan terlebih dengan adanya jenis ahli waris yang masih diragukan kedudukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) serta membahas pada ratio decidendi penetapan majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang lain. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan ahli waris pengganti di dalam Islam dapat dimungkinkan terlebih adanya bentuk penyimpangan dari para ahli waris samping telah di atur pada hukum waris Islam dapat dimungkinkin asalkan dengan mengetahui dengan jelas besaran bagian dari tiap-tiap ahli waris sebelum dilakukan pembagian yang diinginkan sebagai syarat utama yang harus dapat dipenuhi.

Kata Kunci : Harta Waris, Ahli Waris Pengganti, Menyimpangi dari Penetapan Pengadilan Agama

ABSTRAC

Replacement Heirs in Deviating the Determination of Religious Courts that emphasize the complexity of the problem of Islamic heirs in Indonesia, especially the involvement of replacement heirs as one of the heirs raises new problems in the community environment over the diverse opinions of jurists on the position of the successor heirs, the Court as a judicial institution that has the authority to decide/determine the heirs often followed. with deviations from the heirs as petitioners or parties of the determination/decision of the Court to be able to divide outside of the existing judge's decision instead of the agreement of the heirs with the creation of a peace agreement with the form of "Deed of Agreement on the Division of Inheritance" through a Notary.

Together with the Inheritance Certificate, the Certificate of Inheritance Rights that both explain the rights of each heir in obtaining inheritance that can be issued by a Notary often does not know that the Deed of Inheritance Division Agreement has a difference of character with inheritance certificate and inheritance certificate. So that the wishes of the heirs as petitioners/parties in the Determination/court decision on an inheritance case cannot be realized especially with the type of heir who is still in doubt of his position. This research uses the statute approach, conceptual approach, and case approach and discusses the ratio decidendi of the determination of judges about the provisions in Law No. 2 of 2014, Compilation of Islamic Law, and other laws and regulations. The results of this study state that the position of surrogate heirs in Islam can be possible especially the form of deviation from the heirs besides having been regulated in Islamic inheritance law can be possible as long as by knowing the amount of each heir before the desired division is carried out as the main condition that must be fulfilled.

Keyword: Heirs, Surrogate Heirs, Deviate from The Establishment of Religious Courts

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, atas ridho dan kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini, Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini banyak terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi sebagaimana merupakan proses guna menjadikan penulisan ini sempurna dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan dukungan, doa, arahan serta bimbingan dari para pihak, maka dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa syukur yang amat besar kepada:

1. Orang Tua Penulis Ayahanda Zulkifli Dilapanga, Ibunda Yuyun Sri Rahayu Habibie, S.IP. dan Mammy Maya Cahyani Anggraini Habibie, S.E., M.M. atas segala dukungan yang tak terhingga baik secara materiil dan immateriil yang sangat luar biasa dalam hal apapun, selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Saudara Kandung penulis Mohamad Fikry Fatturahman Dilapanga, S.E. dan Rafael Maliq Alfaro Dilapanga. Serta keluarga tercinta yang ada di Gorontalo. yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga atas semangat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Satu dan Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Dua yang telah membantu penulis dalam memberikan ide, gagasan, arahan, bimbingan, dan ilmu yang tak ternilai pada penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji sekaligus selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan Bapak Oemar Moechthar, selaku Anggota Penguji sekaligus selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan. Yang telah memberikan Arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Ibu Fiska Silvia Raden Roro , S.H., M.M., LL.M. Selaku Anggota Dosen Penguji Yang telah memberikan Arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada penulis sebuah kesempatan yang luar biasa untuk dapat Belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu;
7. Para Pimpinan, Dosen, dan Staff Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan bantuan yang sangat luar biasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Kepada sahabat-sahabat saya selama masa studi selama menjadi Mahasiswa Magister Kenotariatan khususnya teman-teman Angkatan 2019 (Sayyid Umar Al Masyhur, Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi, Eva Nurjannah, Tjokorda Kumari Maharatu Istri Pemayun, Komang Giri Arta, Nabila Sofiana, Cindy Lumoring, Thefany Bella Risadewi, Nabilla Azilia Patty) dan dan teman-teman Angkatan 2020 (Vira Prabaswara Tungga Dewi, Nabila Aisyah Padmasari, Arina Buana Sari, Brigita Raras,) serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk mengisi hari-hari baik atas segala canda tawa, sedih, dan drama selama melaksanakan pembelajaran dan masa bakti saya selama menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan 2020 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Januari 2022

Penyusun

Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0018/Pdt.P/2017/PA/Gtlo

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11K/AG/1979.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 334K/AG/2005.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PANITIA PENGJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian.....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	12
1.5.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : KEWENANGAN NOTARIS UNTUK MEMBUAT AKTA KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH AHLI WARIS PENGANTI (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama No.0018/Pdt.P/2017/PA.Gtlo).....	15
2.1. Kewenangan Notaris.....	15
2.2. Surat Keterangan Notaris.....	20
2.3. Akta Kesepakatan Pembagian Harta Waris.....	23

2.4. Penetapan Pengadilan Agama	
No.0018/Pdt.P/2017/PA/Gtlo.....	25
2.4.1. Kasus Posisi.....	25
2.4.2. Obyek Harta Waris.....	27
2.4.3. Penetapan Para Ahli Waris.....	28
2.4.4. Ratio Recidendi Penetapan Hakim	30
BAB III : AKIBAT HUKUM AKTA KESEPAKATAN PEMBAGIAN	
HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI YANG	
DITETAPKAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN	
AGAMA.....	35
3.1. Ahli Waris Pengganti.....	35
3.1.1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti.....	35
3.1.2. Hak Ahli Waris Pengganti.....	37
3.1.3. Kewajiban Ahli Waris Pengganti.....	38
3.2. Pembagian Harta Waris Secara Musyawarah Menurut Hukum	
Islam.....	40
3.3. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Pembagian Harta	
Waris.....	42
3.4. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan	
Pengadilan Agama No.0018/Pdt.P/2017/P.A.Gtlo dengan	
pengaplikasian Hukum Waris Islam di Indonesia.....	46
BAB IV : PENUTUP.....	52
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	